

KOORDINASI DAN SUPERVISI DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH

Dwi Aprillia Linda A.

Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II
Kedeputan Koordinasi dan Supervisi

Komisi **Pemberantasan** Korupsi



TUGAS & WEWENANG KPK



KEDEPUTIAN KOORDINASI DAN SUPERVISI



Dit. Korsup Wil. I

Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Bengkulu

Kejaksaan Agung
Sumatera Selatan
Lampung
Kep. Bangka Belitung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat

Dit. Korsup Wil. II

Dit. Korsup Wil. III

Mabes POLRI
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur

Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara

Dit. Korsup Wil. IV

Dit. Korsup Wil. V

Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat

TITIK RAWAN KORUPSI DI DAERAH



01

Perencanaan & Penganggaran APBD

- Mark up* anggaran
- Alokasi pokir yang tidak sah
- Keterlambatan pengesahan APBD
- Refocussing dan realokasi anggaran yang terlambat

02

Pengadaan Barang dan Jasa

- PBJ yang tidak transparan dan akuntabel
- Adanya kepentingan tertentu dalam pelaksanaan PBJ
- Persekongkolan pelelangan

03

Perizinan

- Perizinan yang tidak transparan dan akuntabel
- Pelayanan yang tidak memadai/representative
- Pendelegasian kewenangan perizinan belum sepenuhnya dilaksanakan

04

Pengawasan APIP

- Kurangnya jumlah APIP
- Kompetensi APIP yang kurang memadai
- Peran APIP belum optimal dalam melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah

05

Manajemen ASN

- Standar pengelolaan ASN belum diimplementasikan (ANJAB ABK, kompetensi)
- Belum ada mekanisme penilaian kinerja dan pemberian *reward & punishment*
- Jual beli jabatan

06

Optimalisasi Pajak Daerah

- Database* pajak kurang optimal dan tidak *up to date*
- Data pajak belum sesuai dengan potensi sebenarnya
- Tidak ada inovasi peningkatan pajak
- Tunggakan pajak yang tidak tertagih

07

Manajemen Aset Daerah

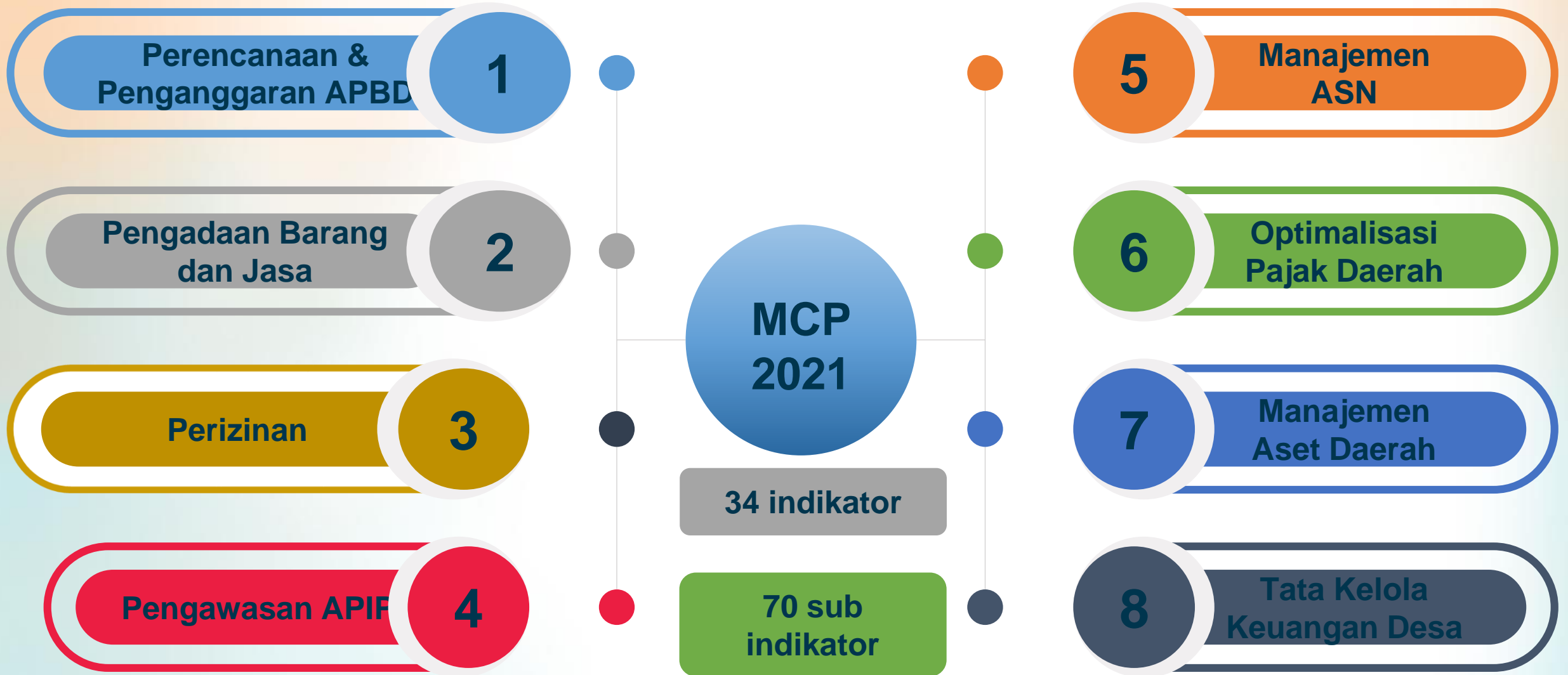
- Rendahnya komitmen pengelolaan aset
- Tidak dilaksanakan/optimal pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi aset
- Pengamanan aset tidak menjadi prioritas sehingga banyak aset belum bersertifikat bahkan bermasalah

08

Tata Kelola Keuangan Desa

- SDM Desa yang masih belum memahami tata kelola keuangan sampai pertanggungjawaban
- Tingginya potensi digunakan pihak tertentu
- Belum dimanfaatkan sesuai dengan tujuan alokasinya

AREA INTERVENSI



OPTIMALISASI PAJAK DAERAH



	Peningkatan Pajak	Penagihan Tunggakan Pajak
Tujuan	Mendorong inovasi dalam rangka peningkatan pajak daerah	Mendorong upaya penagihan tunggakan pajak daerah;
Langkah	Contoh Inovasi Peningkatan Pajak: <ul style="list-style-type: none">- Implementasi <i>Tax Clearance</i>- <i>Update database</i>- Penggunaan teknologi dalam upaya peningkatan pajak daerah, misalnya: koneksi <i>host to host</i>	Pemda bekerjasama dengan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara
Capaian		Realisasi Penagihan Pajak Daerah per tahun 2020 adalah sebesar Rp4.919.363.860.307,00

MANAJEMEN ASET DAERAH

SERTIFIKASI ASET	PENERTIBAN ASET	PENERTIBAN PSU
<p>Sertifikasi merupakan langkah awal dalam Pengamanan aset</p>	<p>Penertiban aset dilakukan untuk menertibkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aset bermasalah (dikuasai pihak ketiga, tidak optimal pemanfaatannya) • Aset daerah pemekaran • Aset P3D <p>Pemda dapat bekerjasama dengan Kejaksaan dan BPKP</p>	<p>Penagihan kewajiban pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) kepada Pemerintah Daerah</p>
<p>Tahun 2020 Dari total aset Pemda sebesar 695.069, yang bersertifikat baru 219.512 bidang (31,58%)</p> <p>Realisasi sertifikasi aset: 2020: 27.199 bidang; senilai Rp24.913.900.173.572,00</p>	<p>Realisasi tahun 2020: Rp3.119.636.709.731,00</p>	<p>Realisasi tahun 2020: Rp30.390.269.085.123,00</p> <p>DKI Jakarta Rp22.726.705.966.700,00 (75%)</p>



PENERTIBAN ASET KL & BUMN (2020)

01

Kementerian/ Lembaga

Rp10.663.709.385.000,00

- Sekretariat Negara
- Kementerian PUPR



Penertiban Aset

02

BUMN

Rp10.663.709.385.000,00

- PT Pertamina
- PT Angkasa Pura II
- PT Krakatau Steel

01

Kementerian PUPR

6.425 bidang

Rp45.908.835.300.546,00



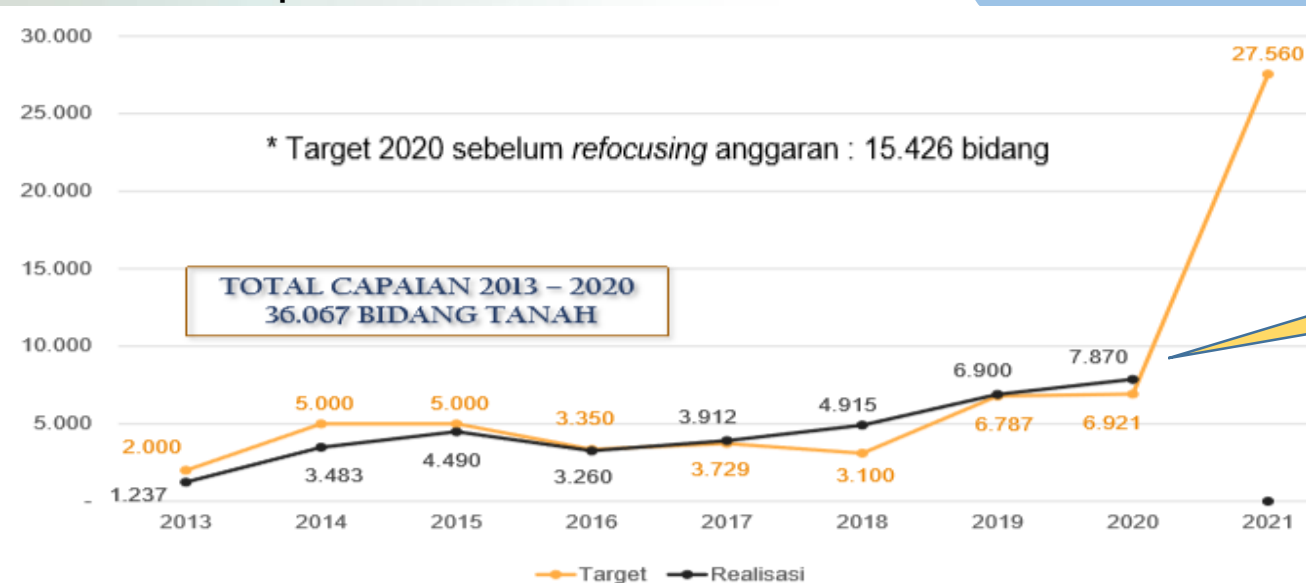
Sertifikasi Aset

02

PT PLN

11.429 bidang

Rp4.013.030.068.588,00



Dari 7.870 sertifikat yang terbit, 7.205 merupakan sertifikat Kementerian PUPR

Sumber: Data DJKN

ASET DALAM KEUANGAN NEGARA/ DAERAH

UU Keuangan Negara
(UU 17/ 2003)

Semua hak dan kewajiban negara yang **dapat dinilai dengan uang** serta segala sesuatu, baik berupa **uang maupun berupa barang** yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

RUANG LINGKUP

Objek

Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa **uang, maupun berupa barang** yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

Subyek

Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh **Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara**

Proses

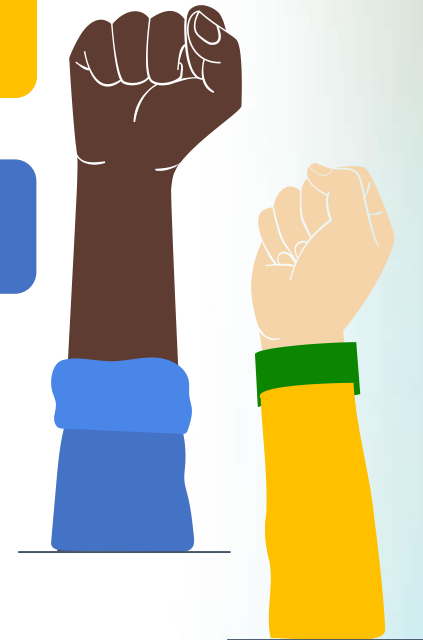
Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan **pengelolaan obyek** sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban

Tujuan

Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan **pemilikan dan/atau penguasaan obyek** sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara

PENGELOLAAN ASET DAERAH

Permendagri 19 Tahun 2016



TITIK RAWAN PENGELOLAAN BMD



SERTIFIKASI DAN PENERTIBAN ASET



PENERTIBAN PSU

REGULASI

Pastikan seluruh regulasi yang diperlukan sudah tersedia (Perda, Perkada, SK Kada)

INVENTARISASI POTENSI PSU

- Identifikasi izin (pemberian izin diikuti dg Surat Pernyataan Penyerahan PSU)
- Koordinasi dg Lurah/ Camat setempat
- Penyusunan database PSU

SOSIALISASI

- Bekerjasama dg Asosiasi
- Seluruh pengembang dikirim surat
- Sosialisasi kepada pengembang scr langsung

VERIFIKASI ADMINISTRASI

- Dok rencana tapak yg disetujui Pemda
- Izin Mendirikan Bangunan
- Izin Penggunaan Bangunan
- Surat Pelepasan Hak

VERIFIKASI TEKNIS

- Persyaratan Teknis (Perundangan Perumkin)
- Kolaborasi dg BPN
- Jangka Waktu jk blm sesuai
- BA Verifikasi

EVALUASI

- Inventarisasi kendala dan hambatan
- Pengambilan kebijakan
- Evaluasi penguatan regulasi

PENGELOLAAN & PEMANFAATAN

- Penunjukan pengelolaan
- Pemanfaatan aset

PENCATATAN ASET

- PSU yang diterima dicatat sbg aset Pemda
- Sertifikat PSU an Pemda

SERAH TERIMA

- BA Serah Terima
- Pengajuan sertifikasi an Pemda

UPAYA PENERTIBAN ASET



Apel Kendaraan Dinas Kab. Kulonprogo



Penyerahan Sertifikat Aset Kab. Bogor



Penertiban Aset Kota Samarinda



Kerjasama dengan APH setempat (Riau)

KENDALA & HAMBATAN

01 Kurangnya komitmen/ semangat dalam pengamanan dan penertiban aset



02 Kurangnya konsistensi dalam *updating database* aset



03 Kurangnya pengendalian dan pengawasan aset



04 Kesengajaan dalam memanfaatkan aset negara/ daerah untuk kepentingan Pribadi/ pihak tertentu



KUNCI KEBERHASILAN



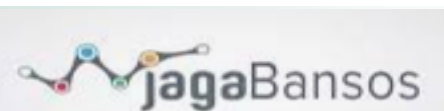
Komitmen Kepala Daerah dan Jajaran

Sinergi dan kolaborasi antar K/L/P

Penguatan kompetensi SDM dan *database* aset daerah

Konsistensi upaya penertiban aset

Terima Kasih



JAGA Penanganan Covid-19:



**Kedeputan Koordinasi dan Supervisi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Jln. Kuningan Persada Kav-4

Jakarta 12950

Telp: (021) 2557 8300

Faks: (021)2557 8333

Call Center: 198

www.kpk.go.id

Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemberantasan Korupsi